

KONFLIK SYI'AH-SUNNI PASCA-*THE ARAB SPRING*

Ahmad Sahide

Program Studi Agama dan Lintas Budaya
Minat Studi Kajian Timur Tengah,
Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada
Email: ahmadsahidie@gmail.com

ABSTRACT

Conflict of Syi'i-Sunni is the conflict that has long history. The seed of this conflict began since the death of Prophet Muhamad SAW. In the beginning, this conflict is the political conflict, it related about who would be the successor of Muhammad's leadership after his death. However, this conflict was brought to the religious (aqidah) conflict among the followers of Ali and the followers of Abu Bakar and the other Friends. This conflict has big impact in colouring the history of the Islamic world civilization which is so difficult to be compromised, to the present. Even this conflict participates in colouring the political conflict in the Middle East, mainly the Arab World, since the Arab Spring exploded in the early of 2011 last. The Arab Spring doesn't just make popular the word of democracy in the political discourse of the Middle East, but also the sentiment of Syi'i-Sunni makes hot the political atmosphere. This writing tries to read the history and the development of Syi'i-Sunni conflict in the Middle East contemporarily.

Keywords: Syi'i-Sunni, Conflict, Middle East, and The Arab Spring.

ABSTRAK

Konflik Syi'ah-Sunni adalah konflik yang memiliki akar historis yang cukup panjang. Benih-benihnya mulai tumbuh sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada awalnya, konflik ini adalah konflik politik, terkait siapa yang akan meneruskan kepemimpinan pascawafatnya nabi. Namun demikian, konflik ini kemudian terseret dalam konflik akidah antara pengikut Ali (Syi'ah) dan pengikut Abu Bakar dan sahabat lainnya. Konflik ini memiliki dampak yang sangat besar dalam mewarnai perjalanan peradaban dunia Islam yang sulit dikompromikan hingga saat ini. Bahkan konflik ini turut mewarnai prahara politik di Timur Tengah, terutama dunia Arab, sejak bergulirnya *The Arab Spring* awal tahun 2011 lalu. *The Arab Spring* tidak hanya memomulerkan demokrasi dalam wacana politik Timur Tengah, tetapi juga sentimen Syi'ah-Sunni turut memanaskan suhu politik. Tulisan ini mencoba membaca sejarah dan perkembangan konflik politik Syi'ah-Sunni di Timur Tengah kontemporer.

Kata Kunci: Syi'ah-Sunni, Konflik, Timur Tengah, dan The Arab Spring.

PENGANTAR

Konflik Syi'ah-Sunni adalah konflik yang benih-benihnya mulai tumbuh pascawafatnya Nabi Muhammad SAW. Konflik ini dimulai dari suksesi kepemimpinan pasca meninggalnya nabi di mana Abu Bakar diangkat menjadi pengganti nabi, melahirkan fraksi antara pengikut setia Ali ibn Abi Thalib dan fraksi yang melegitimasi kepemimpinan Abu Bakar. Pengikut Ali ini belakangan dikenal sebagai kelompok Syi'ah, dan pengikut Abu Bakar dikenal dengan kelompok Sunni. Konflik inilah mewarnai perkembangan politik Timur Tengah hingga dewasa ini, terutama setelah kebangkitan Syi'ah yang dimulai dari Imam Khomeini dengan Revolusi Islam Irannya pada tahun 1979 (Sahide, 2013: 111).

The Arab Spring (Musim Semi Arab) yang menjadi bahasa politik baru terkait dinamika politik di kawasan Timur Tengah, terutama negara-negara Arab, sejak awal Januari 2011 lalu tidak hanya ditandai dengan kebangkitan harapan akan lahirnya sistem politik yang lebih baik dan lebih demokratis dengan berjatuhnya para pemimpin otoriter, dimulai dari Tunisia, Zein Al-Abidin Ben Ali (Ben Ali), yang merambat ke Mesir dengan tergulingnya Hosni Mubarak, kemudian menyeberang ke Libya, yang berhasil mengakhiri era kediktatoran Moammar Khadafy yang sudah berlangsung kurang lebih 40 tahun lamanya. *The Arab Spring* juga ditandai dengan konflik yang makin panas antara Syi'ah dan Sunni seiring dengan musim harapan tersebut. *The Arab Spring* menjadi momentum bagi kedua aliran dalam Islam tersebut untuk memperkuat pengaruhnya dalam politik di kawasan tersebut dengan upaya untuk menyingkirkan yang lainnya. Hal itu terjadi di Bahrain, Mesir, dan Suriah yang masih bergejolak hingga hari ini.

Konflik Syi'ah-Sunni yang mengiringi *The Arab Spring* tidak hanya mempunyai implikasi di kawasan Timur Tengah, tetapi juga memiliki implikasi di Indonesia yang mulai meresahkan sebagian kelompok masyarakat. Dari makalah ini, penulis

mengulas perbedaan Syi'ah-Sunni, akar konflik Syi'ah-Sunni, bentuk-bentuk konflik, dan juga pengaruhnya di Indonesia pasca-*The Arab Spring*.

Dalam membaca konflik Syi'ah Sunni di Timur Tengah pasca-*The Arab Spring*, penulis melihatnya dengan menggunakan pendekatan sejarah. Pada tulisan ini, penulis mengulas sejarah konflik Syi'ah-Sunni yang itu mempunyai akar sejarah yang cukup panjang. Pada artian bahwa kembali bergejolaknya konflik Syi'ah-Sunni di Timur Tengah dan kemudian berdampak ke Indonesia pasca-*The Arab Spring* bukanlah konflik yang baru tercipta. Konflik ini, dalam kajian penulis, memiliki akar historis yang cukup panjang di mana setiap saat konflik tersebut dapat meledak atau ia adalah bom waktu yang dapat bergejolak setiap saat.

Dari sini penulis mengatakan bahwa sejarah merupakan intensi, dapat membangun kesadaran kolektif yang dituangkan ke dalam kesadaran individual. Sejarah merupakan akar dan dasar dari kesadaran (Karim, 2009: 20). Konflik Syi'ah-Sunni di Timur Tengah pasca-*The Arab Spring* bukanlah konflik yang tidak dibangun berdasarkan kesadaran kolektif oleh sejarah.

PEMBAHASAN

Perbedaan-Perbedaan Syi'ah-Sunni Teologi-Teologi Syi'ah

Seorang penulis Mesir, Ahmad Amin (w. 1954) mencoba menyederhanakan ciri-ciri eksklusif Syi'isme menjadi empat prinsip utama saja: *'ismah* (ketakbercacatan Imam), Mahdiisme (Dalam Syi'ah Itsna Asyariah, yang mempercayai adanya dua belas Imam, Muhammad al-Mahdi al-Muntazhar adalah Imam yang kedua belas. Al-Muntazhar gaib (menghilang) pada tahun 260 H. Syi'ah Itsna Asyariah meyakini bahwa suatu saat nanti Muhammad al-Mahdi al-Muntazhar (Imam Mahdi) akan kembali untuk menegakkan keadilan dan kebenaran kepada kaumnya. Paham inilah yang disebut dengan Mahdiisme); *taqiyyah* (melindungi atau menuntun diri) bahwa Taqiyyah adalah salah satu strategi gerakan politik Syi'ah

di mana dalam konsep ini disebutkan bahwa di bawah kondisi yang mengancam keselamatan, seorang pengikut Syi'ah diperbolehkan untuk menyembunyikan identitas ke-Syi'ah-annya dan menampakkan sisi lain dari dirinya. Konsep ini muncul karena sarjana-sarjana Syi'ah menganggap bahwa Syi'ah dalam sejarah selalu menjadi objek persekusi kaum Sunni yang mayoritas dan pemilik kekuatan politik (Warker, 1995: 187); dan *raj'ah* (kekembalian) Imam (Enayat, 1982: 44).

Salah satu perbedaan Syi'ah-Sunni adalah pemahaman mereka terhadap ijtihad. Menurut salah satu prinsip teosofi Syi'ah yang paling fundamental, kebenaran Islam, seperti halnya realitas pola-dasar dari segala sesuatu yang ada di dunia inderawi ini, hanya dapat ditemukan pada *mundus imaginalis*. Jadi, perwujudan lahiriah Islam hanyalah mencerminkan sebagian saja dari kebenarannya. Kebenaran yang seutuhnya hanya diketahui oleh Tuhan, Nabi, dan anggota keluarganya. Satu hal yang dikritik oleh Sunni dari Syi'ah adalah klaim Syi'ah bahwa Imamah merupakan salah satu dari rukun Islam (Enayat, 1982: 22-35).

Teologi Sunni

Hamid Enayat dalam bukunya menjelaskan bahwa pada dasarnya, perdebatan Syi'ah-Sunni tidaklah berkaitan dengan ajaran-ajaran pokok agama. Berbeda, misalnya, dengan perselisihan-perselisihan di antara madzhab-madzhab Kristen, perdebatan ini tidaklah berkaitan dengan sifat Tuhan, atau fungsi para Rasul, atau cara mencapai keselamatan manusia. Perdebatan yang ada hanyalah berkaitan dengan masalah-masalah yang bersifat marjinal dan persoalan-persoalan tersebut, dan bagaimanapun juga tidak berkaitan dengan kewajiban-kewajiban pokok seorang Muslim (shalat, puasa, zakat, haji, dan jihad). Akan tetapi, seiring dengan perjalanan waktu, perdebatan tersebut telah merosot dari pertengkar mengenai persoalan penerus Nabi Muhammad SAW menjadi perpecahan ritual, teologi, dan hukum yang

dapat mempengaruhi keyakinan-keyakinan dan sikap-sikap dasar tertentu, paling tidak secara tidak langsung (Enayat, 1982: 31).

Hubungan antara Syi'ah-Sunni, dalam perjalanannya, merosot sedemikian rupa sampai-sampai kaum Sunni menganggap kaum Syi'ah sebagai betul-betul kafir. Salah satu penyebabnya adalah pemahaman terkait dengan ijtihad. Kaum Sunni telah menolak ijtihad sejak abad X Masehi dan melihatnya sebagai bentuk penyimpangan yang akan menimbulkan kekacauan dan krisis hukum (Enayat, 1982: 39-73).

Pandangan Politik

Pemikiran Politik Syi'ah

Sepanjang perjalanannya, sejarah politik Syi'ah sesungguhnya lebih banyak dipengaruhi oleh *quietisme* (kecenderungan untuk diam dan bersifat apolitis) ketimbang aktivisme di bidang politik. Pada masa pasca Ali itulah Syi'ah sebagai sebuah madzhab terbentuk. Awal sejarah Syi'ah dimulai dengan apa yang dapat dilihat sebagai suatu kekalahan politik (Yamani, 2002: 102).

Terpinggirkan dari ranah politik yang membuatnya apolitis, sehingga paham Syi'ah ini, yang digambarkan oleh Sayyid al-Murtadha (w. 436/1043), menganut paham politik dengan watak "isolasionis" (Enayat, 1982: 20).

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam Syi'ah, yang berhak menjadi Imam adalah dari keturunan Nabi (*ahl al-Bayet*). Konsepsi Imamah, yang dianut Syi'ah, inilah yang menjadi garis pemisah yang tegas antara aliran Syi'ah dengan aliran Sunni (Hitti, 2006: 558). Bagi kaum Syi'ah, menurut al-Qasim menegaskan bahwa seorang imam adalah anugerah dari Tuhan. Ia menolak konsepsi pemilihan umum dengan alasan bahwa manusia sejak dulu suka berdebat; mereka tidak akan pernah sepakat tentang apapun (Black, 2006: 91). Syi'isme, menolak mengakui bahwa pendapat mayoritas dengan sendirinya adalah benar, dan tetap meyakini bahwa semua kekuasaan duniawi dalam kondisi ketiadaan Imam adalah tidak sah (Enayat, 1982: 19-26). Menurut

Syaikh Muhammad al-Husain al-Kasyif al-Ghita, perbedaan utama antara Syi'ah dan kelompok-kelompok Islam yang lain ialah dalam masalah *imamah*, kepemimpinan spiritual para imam (Shihab, 2007: 54).

Pemikiran Politik Sunni

Pada intinya, pemikiran politik Sunni sepakat bahwa pemerintahan adalah sesuatu yang niscaya demi memungkinkan manusia bekerja sama untuk meraih tujuan hidupnya yang sejati. Yakni suatu kehidupan yang baik berdasar syariah yang pada gilirannya, akan menghasilkan bagi mereka tempat yang baik di kehidupan akhirat (Yamani, 2002: 98). Akan tetapi, Sunni juga membatasi seorang khalifah, atau pengganti Nabi Muhammad SAW bahwa mereka haruslah laki-laki dan dari keturunan suku Quraisy, dari kelompok mereka (Brasswell, 1996: 88).

Pada pandangan politik kaum Sunni, mereka mengembangkan strategi pemisahan radikal antara otoritas agama dan otoritas politik. Otoritas agama membentuk sebagian besar tubuh sosial dan menjadi politik didukung oleh kekuatan militer. Untuk menjadi Imam (pemimpin), seseorang tidak perlu, seperti dalam pandangan politik Syi'ah, terbebas dari kemungkinan melakukan kesalahan (*ma'shum*) atau memiliki karakter yang istimewa (Black, 2006:163-169).

Akar Konflik Syi'ah-Sunni

Akidah yang paling berbahaya yang menyulut api penghianatan dalam dada kaum Syi'ah adalah keyakinan mereka bahwa kaum Sunni musuh bagi kaum Syi'ah, mereka membenci, memarahi, dan mencela kelompok Syi'ah. Sementara dalam pandangan kaum Sunni, Syi'ah adalah musuh, bahkan sebesar-besarnya musuh. Karena itulah mereka menyebut kaum Sunni dengan gelar *an-Nawasib* yaitu orang-orang yang sangat bersungguh-sungguh dalam memusuhi Syi'ah (*Ahl al-Bayet*). Oleh karena itu, ada beberapa pendapat dari para syaikh dan fuqaha kaum Syi'ah bahwa musuh kaum Syi'ah yang sebenarnya adalah kaum Sunni, bukan yang lain (Sami', 2006: 19).

Al-Musawi, dalam bukunya, *Isu-Isu Penting Ikhtilaf Sunnah-Syi'ah*, menjelaskan bahwa hal-hal yang mengganggu perasaan kaum Syi'ah sehingga sulit untuk bercampur, atau bersatu-padu dengan saudaranya yang Sunni karena adanya kebiasaan dari kaum Sunni mengkafirkan, menghina, mencera, dan melakukan kebohongan kepada kaum Syi'ah (al-Musawi, 1989:197).

Sementara itu, hal yang mengganggu bagi kalangan Sunni yang membuatnya sulit bersatu-padu dengan Syi'ah adalah karena Syi'ah membenci seluruh Sahabat (*radiallahu 'anhum*) dan mencera semua kalangan salaf (tokoh-tokoh Muslim terdahulu) (al-Musawi, 1989: 205).

Perang dengan Umayyah

Ketika Dinasti Abbasiyah di Baghdad mulai melemah, maka lahirlah Kekhalifahan Fatimiyah (Karim, 2009: 190). Dinasti Fatimiyah adalah salah satu cabang dari Syi'ah Ismailiyah, juga dapat disebut dengan Ismailiyah Fatimiyah (Esposito, 2004: 59), yang berdiri di Afrika Utara kemudian berpindah ke Mesir. Dinasti Fatimiyah merupakan satu-satunya Dinasti Syi'ah dalam Islam yang kuat (Hitti, 2006: 787).

Mereka menganggap gerakan mereka sebagai sebuah alternatif bagi gerakan diam Syi'ah Imamiyah ketika berhadapan dengan Dinasti Abbasiyah yang korup dan pemerintahan lainnya yang tiran (Black, 2006: 99). Padahal, mereka (Syi'ah) juga termasuk pihak yang ikut membangun kekhalifahan Abbasiyah dan turut menumbangkan Umayyah (Hitti, 2006: 556).

Para Khalifah Fatimiyah mempunyai ambisi untuk menyatukan seluruh dunia Muslim di bawah kekuasaannya. Setelah Fatimiyah sudah mulai percaya diri dengan kekuatannya. Ia kemudian, setelah menaklukkan Mesir, mulai melakukan ekspansi besar-besaran ke wilayah kekuasaan Umayyah di Cordova (Imamuddin, 1969: 174).

Fatimiyah di bawah pendirinya, Ubayd Allal al-Mahdi, membangun aliansi dengan Umr ibn Hafsun. Umar ibn Hafsun hadir pada masa pemerintahan Muhammad I (852-886).

Kehadirannya melahirkan pemberontakan yang berbahaya dan berhasil menghancurkan wilayah Tenggara Andalusia (Imamuddin, 1969: 118).

Bekerjasama dengan ibn Hafsun, Ubaydi al-Mahdi mengirim mata-mata ke Spanyol. Ini dimulai ketika Umayyah masih di bawah kekuasaan Muhammad ibn Abdurrahman II sampai Abdurrahman III. Oleh karena itu, pada masanya, Abdurrahman III harus berurusan dengan Fatimiyah di Afrika Utara untuk mencegah bahaya serangan terhadap Spanyol dari kebangkitan Dinasti Fatimiyah (Imamuddin, 1969: 148). Fatimiyah merupakan ancaman yang paling serius dalam sejarah internal dari Andalusia di bawah Abdurrahman III (Watt, 1965: 46). Dari sini konflik Syiah-Sunni pun terus berkepanjangan.

Pasca-Keruntuhan Fatimiyah

Dinasti Fatimiyah yang berdiri pada 909 Masehi ini berakhir masa kejayaannya pada 1171 Masehi. Ada beberapa faktor kemunduran Fatimiyah, antara lain, meskipun Isma'iliyah yang dianut oleh Fatimiyah menekankan masalah keagamaan dan perkembangan ilmu pengetahuan, paham ini belum dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat Islam yang kebanyakan berpaham Sunni (Karim, 2009: 202-203).

Salahuddin al-Ayyubi, seorang yang beraliran Sunni yang teguh merupakan tokoh penting yang mengakhiri masa kejayaan Dinasti Fatimiyah pada tahun 1171 (Hitti, 2006: 611). Salahuddin mendirikan kembali kekuasaan kekhalifahan Abbasiyah, yaitu Dinasti Ayyubiyah yang Sunni (Esposito, 2004: 60).

Era-Safawiyah

Pada 1501 Isma'il menduduki Tabriz dan mengklaim dirinya sebagai Shahdan dalam satu dekade telah menaklukkan wilayah Iran. Sementara pesaingnya Kekaisaran Ottoman di Barat menguasai wilayah Anatolia Timur dan Kekaisaran Shaybani di Timur menguasai Transoxania sepanjang

sungai Oxus. Persaingan politik memutus Kekaisaran Ottoman dari budaya Islam di Iran dan memperkuat pembagian budaya yang tumbuh antara Iran dan Asia Tengah. Batasan-batasan ini membagi Timur Tengah ke dalam pemerintahan yang terpisah antara Ottoman di Turki, Iran, dan budaya-budaya Muslim Asia Tengah (Lapidus, 2007: 234).

Isma'il, yang tidak hanya mengklaim diri sebagai representsai Imam yang tersembunyi, tetapi Imam yang tersembunyi itu sendiri (Momen, 1985: 105). Setelah berkuasa, mengambil keputusan mengubah Iran menjadi negara yang menganut Syi'ah Imamiyah, dan hal ini dilanjutkan oleh penerusnya, yaitu Shah Tahmasp. Kebijakan ini melahirkan tindakan pembasmian terhadap kaum ekstremis, pengeksekusian terhadap penganut aliran sufisme, penindasan terhadap kaum Sunni, dan penyebaran ajaran Syi'ah Imamiyah (Arjomand, 1984: 109).

Ketegangan Syi'ah-Sunni yang telah berpusat di Iran di bawah Safawiyah ini mencapai puncaknya pada abad XX, ketika Imam Khomeini berhasil menggulingkan Reza Shah Pahlevi dengan revolusi Islam yang digagasnya (Lapidus, 2007: 467). Dinasti Safawiyah memerintah Iran hingga tahun 1722 (Muhammad, 2010:81-82). Setelah Safawiyah, Dinasti Qajar memerintah Iran dari tahun 1779 sampai 1925 banyak meniru Safawiyah (Lapidus, 2007: 467).

Revolusi Islam Iran

Peralihan kekuasaan dari Dinasti Qajar ke Dinasti Pahlevi pada tahun 1925 oleh Reza Khan dengan cara kudeta diwarnai kekejaman-kekejaman. Tidak heran anak penggantinya, Mohammad Reza Shah Pahlevi mewarnai perilaku represifnya. Sejak Reza Shah berhasil menggulingkan Dinasti Qajar, maka beberapa program modernisasi besar-besaran dari Barat di bidang pendidikan, militer, industri, dan pertanian dilakukan (Maulana, 2003: 40).

Percepatan proses modernisasi yang dilakukan oleh Reza Shah Pahlevi ini menjadi bumerang dan menyebabkan keruntuhan

kekuasaannya pada tahun 1979. Hal ini dikarenakan kebijakan yang dijalankan oleh Shah Iran bertentangan dengan kebudayaan Islam, adat istiadat masyarakat Iran yang sesuai dengan syari'at Islam, dan juga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan rakyat bawah baik di bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya (Maulana, 2003: 163). Puncak dari ketidakpuasan ini adalah ketika meledak revolusi Islam Iran pada tahun 1979 yang digerakkan oleh Imam Khomeini.

Imam Khomeini berpandangan bahwa asas kebangkitan (Islam) ini berasal dari dua factor, yaitu *pertama*, dari banyaknya tekanan luar dan dalam negeri. *Kedua*, harapan dia dan umat membentuk suatu pemerintahan Islami, dan harapannya agar hukum Islam diterapkan di Iran seperti era awal Islam (Lakza'i, 2010: 116-117). Revolusi Islam Iran ini telah menjadi konsep-konsep pemerintahan faqih (*wilayat-e-faqih*), yaitu Konsep *wilayat-e-faqih* berpandangan bahwa Allah SWT adalah pencipta dan hakim mutlak yang mengatur alam semesta dan segala isinya. Allah juga memilih manusia sebagai khalifah di muka bumi. Untuk keselamatan manusia di muka bumi, Allah memilih orang-orang yang memiliki unsur-unsur kepribadian yang murni serta luhur secara fitrah. Merekalah yang berhak memimpin umat, yaitu para Nabi, para Imam, dan para Fuqaha. Para *anbiya'* sudah berlalu dan *aulya'* atau Imam sudah ghaib, maka sekarang umat berada pada kepemimpinan para fuqaha atau faqih (Maulana, 2003: 89) dan *marja' taqlid* (tempat rujukan dan anutan umat) merupakan bagian dari perkembangan doktrin imamah Syi'ah (Ahmad, 1996: 129).

Bentuk-Bentuk Konflik

Konflik Syi'ah-Sunni adalah konflik yang memiliki akar sejarah yang panjang. Di atas telah dijelaskan bahwa konflik ini berawal setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, jika kita mencermati dengan seksama konflik Syi'ah-Sunni, terutama di kawasan Timur Tengah, konflik tersebut memiliki dua bentuk universal. *Pertama*, konflik antara kelompok masyarakat dengan rezim, baik itu

rezim yang Syi'ah dan kelompok masyarakat yang Sunni maupun sebaliknya. *Kedua*, konflik antarnegara (rezim).

Bentuk konflik yang pertama dapat dilihat bahwa pada bulan April 2013 lalu, dunia disuguhi berita dari Hawija, Irak Utara, terkait tewasnya lebih dari 50 orang dari pengunjung rasa Muslim Sunni (*Kompas*, 25/04/2013). Apa yang terjadi dari Hawija pada waktu itu adalah akibat dari 'kebencian lama' yang dibangun oleh Saddam Hussein ketika berkuasa. Di era Saddam, yang menganut Islam Sunni, kelompok Syi'ah, yang jumlahnya kurang lebih 60%, mendapatkan perlakuan politik yang sangat kejam dari Saddam karena dianggap berpihak pada Iran dalam Perang Teluk. Bahkan pada tahun 1980, pemimpin umat Syi'ah Irak, Imam Ayatullah Baqir al-Shadr, dihukum mati bersama keluarga dan pengikutnya (Sihbudi, 1991).

Setelah Amerika Serikat (AS) menginvasi Irak pada tahun 2003 lalu, rezim Saddam pun, yang dicap sebagai pemimpin tiran, berakhir dan bergulirlah demokratisasi. Sunni yang berkuasa penuh pada era Saddam perlahan-lahan tersingkir dari pusat-pusat kekuasaan. Hawija, yang dulunya dianakemaskan oleh Saddam, kini menghadapi alur sejarah yang berkebalikan. Hawija merasa dianaktirikan oleh PM Nouri al-Maliki yang Syi'ah (*Kompas*, 25/04/2013).

Tesis Jack Snyder sepertinya tepat dalam melihat perkembangan demokratisasi di Irak saat ini bahwa demokratisasi sekedar mencerminkan cita-cita kelompok rakyat tertentu yang sudah lama terbentuk, yang tidak cocok dengan cita-cita kelompok rakyat yang lain. Argumen "kebencian lama" merupakan salah satu bentuk wawasan "persaingan antar-kelompok rakyat" (Snyder, 2003: 22-23). Perlakuan sebagai anak tiri bagi warga Hawija (yang mayoritas Sunni) oleh PM Nouri al-Maliki sepertinya tidak bisa lepas dari argumen 'kebencian lama' tersebut. Snyder menambahkan bahwa demokratisasi (pemilihan umum) sekedar menjadi sensus dan bukan proses permusyawaratan. Demokratisasi, dengan

nasionalisme SARA, akan cenderung menghasilkan tirani mayoritas atau pertarungan hidup-mati antara kelompok SARA yang sama-sama menghendaki negara buat kelompok sendiri.

Di Suriah melihat konflik yang bentuknya sama dengan konflik di Irak; perlawanan rakyat kepada rezim yang alirannya berbeda. Presiden Suriah, Bashar al-Assad, berasal dari kelompok Syi'ah Alawite yang minoritas. Sejak Hafez al-Assad hingga Bashar al-Assad, akses krusial pada pusat-pusat kekuasaan sangat terkait dengan afiliasi agama dan keluarga. Sumber-sumber keuangan dan politik mengalir ke Alawite yang memegang jabatan-jabatan kunci dalam "korps perwira, pasukan keamanan internal, dan partai Ba'ath." Pola seperti ini terus dijalankan oleh Bashar al-Assad hingga saat ini. Dengan mempertahankan pola seperti ini, maka Assad sebenarnya membuka peluang pecahnya perang saudara. Bila kaum Alawite yang sangat sedikit itu tetap setia pada keluarga Assad karena memperoleh keuntungan dari kesetiannya, sementara kelompok yang mayoritas, yaitu Sunni, terpinggirkan, maka terpecahnya Suriah tinggal menunggu waktu dan ini yang sedang menjadi pertunjukan menarik di Suriah hari ini. Hal yang sama pernah terjadi di Irak (Kuncahyono, 2013: 148) yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Pertarungan sengit di Suriah hari ini adalah pertarungan antara rezim dan kelompok oposisi. Aron Lund menyebutkan bahwa ada tiga "generasi" oposisi Suriah. "Generasi Pertama" merupakan salah satu generasi yang dibentuk pada era-prakemerdekaan dan saat ini direpresentasikan oleh Persaudaraan Muslim (*Muslim Brotherhood*). Partisipasinya dalam pergolakan bersenjata pada akhir 1970-an dan awal 1980-an, dengan agenda sektarian Sunni-nya, membuat MB menjadi kambing hitam dari rezim yang berkuasa, dan Undang-Undang Pidana, pasal 49 melarang keanggotaan kelompok ini (Kuncahyono: 150).

Gejolak politik di Bahrain awal-awal Musim Semi Arab (*The Arab Spring*) juga

kuat diwarnai bentuk konflik yang sama. Di Bahrain, kelompok mayoritas Syi'ah (70%) telah sejak lama menjadi warga kelas dua bagi para penguasa Sunni. Tidak lama setelah revolusi meledak di Tunisia yang mengakhiri kekuasaan Zein al-Abidin Ben Ali, tepatnya pada tanggal 14 Februari 2011, gejolak demonstrasi juga dimulai di Bahrain dan bentrokan terjadi hingga helikopter berputar-putar di atas kota Manama, tempat berkumpulnya para demonstran. Sedikitnya 14 orang terluka dalam bentrokan tersebut dan aparat menggunakan udara mata dan peluru karet memasang gas untuk membubarkan pengunjuk rasa di desa Syi'ah, sebagian besar Nuwaidrat di negara barat daya (Tamburaka, 2011: 159-160).

Bentuk konflik yang kedua adalah konflik antarnegara. Sebagaimana kita ketahui bahwa Revolusi Islam Iran yang meledak pada tahun 1979, yang digerakkan oleh ulama Syi'ah, telah menimbulkan pengaruh yang cukup besar di dunia Islam, khususnya di negara-negara kawasan Timur Tengah (Sahide, 2013: 91). Di kawasan ini, pengaruh tersebut berupa, antara lain, munculnya apa yang kemudian dikenal sebagai gerakan-gerakan Islam "Fundamentalis", "radikal", "militan" maupun "ekstrem". Gerakan-gerakan semacam itu yang di beberapa negara cenderung "antikemapanan", dan biasanya disebut juga sebagai "kelompok-kelompok Iran" (Sihbudi, 1991: 191).

Revolusi Islam Iran 1979 memang membangkitkan semangat dan eksistensi kaum Syi'ah dan hal ini mempengaruhi hubungan internasional di kawasan kaya minyak tersebut. Salah satu dampaknya yang dilihat adalah pascarevolusi tersebut, hubungan Iran dengan beberapa negara yang dipimpin oleh kelompok Sunni memanas. Sejak saat itu, hubungan Kairo-Teheran rusak berat. Haluan politik kedua negara juga berseberangan; Iran anti-Amerika sementara Mesir membangun hubungan yang cukup mesra dengan Amerika. Pada Perang Teluk Iran-Irak 1980-1988 juga tidak terlepas dari sentimen Syi'ah-Sunni. Negara-negara Sunni, yang takut dengan ekspansi Syi'ah Imam Khomeini, berada di

belakang Saddam Hussein. Di satu sisi, Iran didukung oleh negara-negara atau kelompok-kelompok pemimpin Syi'ah, seperti Suriah, Hezbollah, gerakan Hamas, dan beberapa gerakan perlawanan di negara-negara lain (Sahide: 103).

Konflik Syi'ah-Sunni yang berkepanjangan itu turut mewarnai dinamika politik di kawasan tersebut pasca-*The Arab Spring*. Hal ini dapat di lihat dari prahara Suriah yang hingga kini belum selesai. Pada konflik Suriah, ada permainan asing yang memiliki pengaruh sangat besar. Dari konflik ini, ada pertarungan antara Amerika Serikat dan sekutunya yang mayoritas negara Sunni dengan China dan Rusia yang selalu menggandeng Iran yang dikenal sebagai negara Syi'ah itu. Negara-negara Sunni pun berada di belakang Amerika, salah satunya adalah Arab Saudi, sementara negara-negara Syi'ah berada di belakang China dan Rusia.

Hubungan Arab Saudi dan Iran sudah sejak dulu memiliki masalah besar, baik soal politik, strategis, maupun ideologis (Syi'ah dan Sunni). Mereka berebut pengaruh serta supremasi di Timur Tengah dan Teluk. Pada krisis Suriah sangatlah jelas: Iran mendukung rezim Bashar al-Assad yang Syi'ah, sedangkan Arab Saudi mendukung kelompok oposisi yang mayoritas Sunni. Kepemilikan Iran akan nuklir juga menjadi persoalan bagi Arab Saudi. Arab Saudi sangat tidak menginginkan posisinya sebagai *primus inter pares*-yang terkemuka di antara sesama negara-negara Muslim disaingi oleh Iran (Kompas, 11/12/2013).

Berita terbaru terkait dengan sentiment Syi'ah-Sunni antarnegara adalah ketika Kepala Inteligen Arab Saudi Pangeran Bandar bin Sultan, negara 90% Sunni, diam-diam bertemu dengan kepala badan inteligen Israel di Genewa, Swiss. Pertemuan ini berlangsung pada tanggal 27 November 2013, tidak lama setelah pertemuan Iran, dan P5+1 (AS, Rusia, China, Inggris, Perancis, dan German). Pertemuan badan inteligen kedua negara karena kekecewaan negara Wahabi itu dengan hasil dari pertemuan di Genewa yang dilihat menguntungkan Iran

terkait dengan program nuklirnya (Kompas, 11/12/2013).

Dampaknya terhadap Kerukunan Beragama di Indonesia

Indonesia yang sudah lama membangun wacana toleransi dan pluralisme tidak lepas dari dampak prahara yang belum berujung di Timur Tengah pasca-*The Arab Spring*. Sebagaimana di atas telah dijelaskan bahwa ada sentimen Syi'ah-Sunni yang mewarnai konflik politik di negara-negara Timur Tengah pasca-*The Arab Spring*, sentimen itu adalah sentimen mazhab Syi'ah-Sunni yang memiliki akar sejarah yang panjang.

Kelompok Syi'ah, di beberapa kota, belakangan ini sempat terusik dengan adanya isu-isu penyerangan terhadap markas mereka. Beberapa di antara mereka tutup untuk sementara, misalnya yayasan Rausyanfikir di Yogyakarta. Selain itu, ada banyak selebaran yang bertuliskan "Jangan Ragu, Syi'ah Bukan Islam", seminar yang diadakan, serta buku-buku yang diterbitkan oleh kelompok tertentu untuk mendiskreditkan kelompok masyarakat yang beraliran Syi'ah.



Gambar 1.

Foto ini diambil pada bulan Desember 2013 di papan pengumuman yang terletak di bagian depan masjid Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Tanpa bermaksud membenarkan aliran keyakinan mereka, tetapi jika hal ini dilihat lebih obyektif, selebaran-selebaran dan propaganda itu tidak lepas dari kepanjangan prahara konflik Syi'ah-Sunni di Timur Tengah pasca-*The Arab Spring*. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor. Pertama dari segi momentum. Wacana mendiskreditkan Syi'ah ini begitu masif pasca-*The Arab Spring* bergejolak di Timur Tengah. Di Yogyakarta misalnya, yayasan Rausyanfikir sudah cukup lama berdiri dan aktif dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan keilmuan yang melibatkan banyak kaum terdidik, misalnya mahasiswa, tetapi baru kali ini yayasan Syi'ah tersebut diancam untuk diserang oleh kelompok tertentu. Jika penyerangan yayasan Rausyanfikir ini berdalih dengan alirannya yang dianggap sesat, tentulah sejak awal berdirinya ia diserang. Penyerangannya bukan setelah ia berdiri selama lebih dari sepuluh tahun. Oleh karena itu, jika melihat dari segi momentumnya di mana wacana pendiskreditan ini masif tentulah tidak lepas dari prahara politik yang kini sedang menjadi tontonan menarik di Timur Tengah.

Kedua dari faktor Arab Saudi. Arab Saudi adalah negara yang sudah sejak awal resmi memfatwakan Syi'ah sebagai aliran yang sesat. Di Arab Saudi, aliran Syi'ah tidak mendapatkan toleransi sedikit pun. Tidak ada kompromi untuk Syi'ah di sana. Lebih dari itu, pemerintah Saudi sudah menyatakan bahwa aliran Syi'ah terlarang di negaranya (Muhammad, 2010: 113). Oleh karena itu, hubungan Iran, yang mayoritas Syi'ah, dengan Arab Saudi tidak pernah harmonis. Bahkan Arab Saudi lebih memilih Amerika sebagai sahabat mulia daripada Iran dan negara-negara Syi'ah lainnya. Pertarungan Iran dan Arab Saudi mendapatkan momentum dalam kasus Suriah. Iran dengan sepenuh hati dan totalitas berdiri di belakang Bashar al-Assad, presiden yang berasal dari kelompok Syi'ah Alawite. Sementara Arab Saudi berada di belakang kelompok oposisi yang terus berupaya menggulingkan rezim Syi'ah yang berkuasa di Suriah.



Gambar 2.

Menurut beberapa analisis, kekesalan Arab Saudi yang selalu gagal menggulingkan

rezim Syi'ah di Suriah ini membuatnya mengambil langkah lain dengan menghabisi sayap-sayap gerakan Syi'ah di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, Arab Saudi punya banyak kantong-kantong gerakan berupa yayasan/lembaga pendidikan yang didukungnya dengan suntikan dana yang cukup melimpah. Sayap-sayap gerakan ini tentulah bermanfaat bagi Arab Saudi sebagai pelampiasan dendamnya yang gagal di Suriah dengan menghabisi kelompok sayap gerakan Syi'ah di Indonesia. Jika melihat dari propaganda pendiskreditan ini; seminar dan penerbitan buku yang dibagikan secara gratis tersebut menghabiskan dana dengan nominal yang tinggi. Hal itu tidak bermasalah bagi Arab Saudi yang kaya akan sumber daya alamnya, minyak.

SIMPULAN

Sekali lagi ditegaskan bahwa tulisan ini tidak bermaksud membenarkan aliran kepercayaan kelompok Syi'ah yang dianggap sesat itu. Tulisan ini hanya bermaksud mengajak semua untuk lebih obyektif melihat perkembangan isu Syi'ah-Sunni di Indonesia akhir-akhir ini. Wacana yang masif mendiskreditkan Syi'ah belakangan ini bukan karena alirannya itu sesat, tetapi ini adalah dampak dari prahara politik yang kini sedang menjadi tontonan menarik di negara-negara Arab. Oleh karena itu, tidaklah mudah termakan provokasi yang berkedok agama dari skenario besar yang kini sedang dimainkan oleh orang-orang yang punya pengaruh dan kekuatan besar di mana hal itu dapat mengganggu keharmonisan umat dalam beragama.

Pendekatan sejarah untuk membaca konflik Syi'ah-Sunni yang kembali hangat pasca-the Arab Spring, akan terlihat dengan jelas bahwa konflik tersebut lebih banyak diwarnai oleh faktor politik. Hamid Enayat, dalam bukunya, memperkuat pandangan ini dengan mengatakan bahwa pada dasarnya perdebatan Syi'ah-Sunni tidaklah berkaitan dengan ajaran-ajaran pokok agama. Perbedaannya terletak pada perselisihan-perselisihan di antara madzhab-madzhab

Kristen, perdebatan ini tidaklah berkaitan dengan sifat Tuhan, atau fungsi para Rasul, atau cara mencapai keselamatan manusia. Perdebatan yang ada hanyalah berkaitan dengan masalah-masalah yang bersifat marjinal dan persoalan-persoalan tersebut, dan bagaimanapun juga tidak berkaitan dengan kewajiban-kewajiban pokok seorang Muslim (shalat, puasa, zakat, haji, dan jihad). Akan tetapi, seiring dengan perjalanan waktu, perdebatan tersebut telah merosot dari pertengkaran mengenai persoalan penerus Nabi Muhammad SAW menjadi perpecahan ritual, teologi, dan hukum yang dapat mempengaruhi keyakinan-keyakinan dan sikap-sikap dasar tertentu, paling tidak secara tidak langsung (Enayat, 1982: 31). Apa yang terjadi di Timur Tengah hari ini adalah konflik politik yang kemudian merosot kepada konflik agama (fiqhi) yang dampaknya terasa sampai ke Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Mumtaz. 1996. *Masalah-masalah Teori Politik Islam*. Bandung: Mizan,
- Al-Musawi, Syarafuddin. 2008. *Dialog Sunnah-Syi'ah*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Arjomand, Said Amir. 1984. *The Shadow of God and the Hidden Imam*. London: The University of Chicago Press.
- Enayat, Hamid. 1982. *Modern Islamic Political Thought*. London: The Macmillan Press Ltd.
- Esposito, John L. 2004. *Islam Warna-Warni*. Jakarta: Paramadina.
- Hitti, Philip K..2006. *History of The Arabs*. Jakarta: Serambi.
- Imamuddin, S., M.1969. *A Political History of Muslim Spain (A revised and enlarge edition)*. Dhaka: najmah & Sons Ltd.
- Karim, Abdul, M. 2009. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
- Kuncahyono, Trias. 2013. *Tahrir Square, Jantung Revolusi Mesir*. Jakarta: Kompas.

- Kompas*, 2013. *Dari Riyadh ke Tel Aviv*. Edisi 11 Desember 2013.
- Kompas*, 2013. Edisi 25 April.
- Lakza'i, Akbar Najaf. 2010. *Dinamika Pemikiran Politik Imam Khomeini*. Jakarta: Shadra Press.
- Lapidus, Ira M. 2007. *A History of Islamic Societies*. New York: Cambridge University Press.,
- Maulana, Noor, A. 2003. *Revolusi Islam Iran Dan Realisasi Vilayat-I Faqih*. Yogyakarta: Juxtapose Research dan Publication Study Club.
- Momen, Moojan. 1985. *An Introduction to Shi'i Islam, The History and Doctrines of Twelver Shi'ism*. New Haven and London: Yale University Press.
- Muhammad, Ardison. 2010. *Iran, Sejarah Persia & Impatan Masa Depan Negeri Kaum Mullah*. Surabaya: Penerbit Liris.
- Sami', Imad Ali Abdus. 2006. *Penghianatan- Penghianatan Syiah, Dan Pengaruhnya Terhadap Kekalahan Umat Islam*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Sihbudi, M. Riza. 1991. *Bara Timur Tengah, Islam, Dunia Arab, Iran*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Sahide, Ahmad. 2013. *Ketegangan Politik Syi'ah-Sunni di Timur Tengah*. Yogyakarta: The Phinisi Press.
- Snyder, Jack. 2003. *Dari Pemungutan Suara ke Pertumpahan Darah*. Terj. Martin Aleida dan Parakitri T. Simbolon. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Tamburaka, Apriadi. 2011. *Revolusi Timur Tengah, Kejatuhan Para Penguasa Otoriter di Negara-Negara Timur Tengah*. Yogyakarta: Penerbit Narasi.
- Warker, E. Paul. 1995. *Taqiyyah* dalam John L. Esposito (ed), *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World IV*. New York: Oxford University Press.
- Watt, W. Montgomery. 1965. *A History of Islamic Spain*. Edinburgh: Edinburgh University Press.